
BIJAK BERMEDSOS MEMINIMALISASI ASN *FLEXING*

(Be Wise In Using Social Media To Minimize ASN Flexing)

Ria Anggreni

(SD Negeri 6 Kota Pangkalpinang)
e-mail: riaanggreni27@admin.sd.belajar.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fenomena hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) dewasa ini yang terjebak dalam hedonisme dan *flexing*. Penting untuk diingat bahwa ASN bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, gaya hidup yang terlalu mewah dan boros dapat dikritik dan memengaruhi reputasi orang dan organisasi yang mereka representasi. Pemerintah biasanya menetapkan standar dan peraturan tentang etika dan perilaku ASN, termasuk bagaimana menggunakan sumber daya publik. ASN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan efisiensi, dan seringkali ada kontroversi tentang pengeluaran yang tidak perlu atau tidak terkait dengan tugas pemerintah. Sebuah pendekatan yang adil dan seimbang diperlukan untuk mengatasi gaya hidup hedonisme ASN dan ASN harus bijak dalam memosisikan diri sebagai publik figur dengan bijak dalam menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Bijak Bermedsos, ASN, *flexing*.

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of the lives of today's State Civil Servants (ASN) who are trapped in hedonism and flexing. It is important to remember that ASN is responsible for the use of public resources and carries out its responsibilities in the public interest. Therefore, overly luxurious and extravagant lifestyles can be criticized and affect the reputation of the people and organizations they represent. The government usually sets standards and regulations on ASN ethics and behavior, including how to use public resources. ASNs are expected to carry out their duties with integrity and efficiency, and there is often controversy about spending that is unnecessary or unrelated to government duties. A fair and balanced approach is needed to overcome ASN's hedonistic lifestyle and ASN must be wise in positioning themselves as public figures wisely in using social media.

Keywords: *Be wise in using social media, ASN, flexing.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan gaya hidup sebagian besar ASN yang cenderung memamerkan harta dan kemewahan, sehingga menimbulkan kemirisan bagi masyarakat yang ASN maupun yang bukan ASN.

ASN menyukai publisitas dan media sosial sangat penting untuk kehidupan modern termasuk ASN karena memungkinkan orang untuk menunjukkan kehidupan mereka kepada umum, yang dapat mendorong ASN untuk pamer agar terlihat lebih baik dan lebih bahagia. (Laksamana, 2018)

Pada dasarnya, manusia ingin diakui dan diterima oleh orang lain. Memenuhi kebutuhan ini dapat dicapai melalui pamer; ASN yang pamer ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sukses dan kaya. (Laksamana, 2018)

Kompleksitas psikologis, seperti rasa tidak aman atau rendah diri, juga dapat menyebabkan pamer. ASN yang pamer mungkin tidak puas dengan kehidupannya, sehingga mereka berusaha menutupi kekurangan mereka dengan menunjukkan apa yang mereka miliki.

Ekspresi kekayaan para pejabat publik dan keluarganya dengan *flexing* di media sosial menjadi perhatian publik. Dinilai bahwa peristiwa ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Memang menjadi hak si ASN untuk menjadi kaya, apalagi didapat dengan cara yang benar dan wajar. Tetapi kembali etika moral seorang ASN untuk peka dalam kondisi perekonomian yang saat ini tidak menentu pasca *Covid-19*.

Seperti kasus yang viral dan menyita banyak perhatian, yaitu yang menimpa seorang mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Awal terkuaknya harta tidak wajar dari sosok ini justru dari anaknya yang tersandung kasus penganiayaan dan harus berurusan dengan hukum. Mata jeli netizen mengaitkan perilaku nakal dengan hedonnya seorang anak pejabat yang berstatus PNS di media sosial karena cenderung pamer sehingga mengakibatkan krisis moral.

Mantan pejabat ini menjadi sasaran kecurigaan masyarakat karena statusnya tidak berimbang dengan harta yang diperoleh. Kalkulasi pendapatan seorang pejabat ini ibarat bom, meledak ketika terkuak. Instansi ini sudah menjadi rahasia umum sebagai lahan “basah” atau ladang duit bagi pegawainya apalagi pejabatnya.

Hal ini terbukti ketika diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak aliran dana dan transaksi perbankan yang mencurigakan. Usut diusut, mantan pejabat ini menerima gratifikasi dari wajib pajak ketika menjabat.

Kasus yang sangat menggemparkan dan menimpa DJP merembet ke instansi lainnya. Seperti istri pejabat yang memakai tas mewah, walaupun bukan niatan untuk pamer di Instagram, akibat dari kasus mantan pejabat DJP ini maka berimbas pula kepada yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berlawanan menyerang di postingan, lalu mengulik harga tas mewah dan tentunya ke pendapatan sang suami. Apalagi saat ini menjadi tahun politik dan menjadi kerawanan seorang calon pemimpin daerah dicari-cari kesalahannya.

Salah satu konsekuensi negatif dari kasus ini adalah munculnya tuduhan bahwa istri pejabat di kantor lain juga memiliki gaya hidup mewah. Salah satu contohnya adalah istri pejabat di suatu wilayah yang mengunggah foto di Instagram dirinya mengenakan tas mewah. Pihak yang berlawanan kemudian menyerang postingan tersebut.

Pihak berlawanan menyatakan bahwa istri pejabat tersebut melakukan pamer kekayaan. Selain itu, mereka

mempertimbangkan biaya tas mewah tersebut dan membandingkannya dengan pendapatan sang suami. Istri pejabat tersebut jelas tidak senang dengan tuduhan tersebut. Ia tidak terlibat dalam kasus mantan pejabat DJP; ia hanya mengunggah foto dirinya mengenakan tas mewah tersebut dan didapat dari penghasilan atau tabungan.

Unggahan istri pejabat di media sosial menjadi sasaran serangan karena kasus tersebut sedang hangat dibicarakan imbas dari kasus yang mencuat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun politik, seorang calon pemimpin daerah lebih peka dan bijak bermedsos karena rentan dicari kesalahannya.

Sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil kerja mereka dan membelanjakan uang mereka dengan cara yang mereka sukai selama itu dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras dan ingin menikmati pengalaman atau barang yang mereka sukai. (Febriani & Dewi, 2019).

Seseorang dalam menjaga keseimbangan, bagaimanapun, dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika pribadi adalah penting (Natika & Septianti, 2023). Seorang pejabat atau pegawai negeri yang menikmati pengalaman mewah atau barang mewah mungkin dianggap pamer atau kurang sensitif terhadap keadaan sosial yang sulit bagi banyak orang.

Seseorang harus memiliki kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain yang mungkin kurang beruntung jika mereka berhak atas kebahagiaan pribadi dan kesenangan. Ini dapat membantu menghindari perselisihan atau perasaan negatif dari rekan kerja atau masyarakat. Integritas dan etika pribadi penting, terutama ketika bekerja untuk pemerintahan atau organisasi yang membantu orang lain. (Tan, 2018). Pada artikel ini, penulis membahas tema

Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan *Flexing*) para Aparatur Sipil Negara dengan judul “Bijak Bermedsos Meminimalisasi ASN *Flexing*”.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan subjek berdasarkan informasi aktual. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) karena ingin menggali informasi mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif tentang gaya hidup *flexing* yang dipamerkan di media sosial.

1. Jenis Penelitian.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan subjek dengan menggunakan data aktual. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) Karena ingin menggali informasi mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif tentang gaya hidup ASN yang *flexing*. Peneliti adalah instrumen kunci dalam studi ini, seperti halnya dalam studi kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendeskripsikan secara umum pentingnya bijak dalam bermedia sosial untuk meminimalisasi gaya hidup *flexing*. Pendekatan analisis dilakukan untuk mengetahui dampak positif bijak bermedia sosial. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang subjek yang diteliti, data akan dikumpulkan dan ditafsirkan.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang relevan dengan penelitian ini dan studi literatur (Moleong, 2017). Informan yang diwawancarai adalah ASN yang terindikasi

melakukan *flexing* dan ASN yang tidak melakukan *flexing*.

4. Analisis Data.

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif tidak menguji hipotesis atau membuat kesimpulan tentang hubungan antarvariabel; sebaliknya, ia bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. (Ramdhan, 2021).

Dalam analisis kualitatif, kata-kata seperti deskripsi, interpretasi, dan analisis digunakan untuk menggambarkan data. (Octaviani & Sutriani, 2019).

C. KERANGKA TEORI

1. Bijak Bermedsos.

Media sosial merupakan sarana komunikasi dan informasi yang sangat populer saat ini. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menjalin komunikasi dengan teman dan keluarga, mencari informasi, hingga berbisnis. (Haniza, 2019).

Kehidupan kontemporer sangat bergantung pada media sosial dan ASN harus memahami cara menggunakannya dengan benar agar tidak berdampak buruk pada masyarakat, organisasi, atau dirinya sendiri.

Penggunaan media sosial dengan bijak menjadi perhatian yang penting. Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu benar. Informasi yang salah dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan media sosial dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan masalah kesehatan mental, sehingga pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial. (Simarmata et al., 2019).

Literasi digital mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang diperlukan untuk memanfaatkan

teknologi informasi sebagai alat bantu produktif dalam belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM Indonesia sehingga mereka tidak hanya dapat menggunakan gawai. (Sulianta, 2020).

Lima Visi Presiden untuk Indonesia telah mempercepat literasi digital: pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, keterbukaan investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Presiden juga telah memberikan lima (5) arahan untuk mempercepat transformasi digital: peningkatan akses dan peningkatan infrastruktur digital, peta jalan transformasi digital di sektor strategis, dan percepatan integrasi digital. (Fatoni, 2022).

Empat (4) PILAR Literasi Digital terdiri dari Kemampuan Digital, yang mencakup kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital; Etika Digital, yang mencakup kemampuan seseorang untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika; dan Keamanan Digital, yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan dan bahaya. (Estiningsih, 2023).

Saat ini, era transformasi digital memerlukan keterampilan *soft skill* dan teknik yang kuat. Di tahun 2020, penggunaan *internet* di Indonesia naik 64%, atau 175,4 juta pengguna aktif, dan 338,2 juta orang menggunakan layanan *mobile*, dengan 59% pengguna aktif menggunakan media sosial (*We Are Social*, 2020 dalam Durhan, 2021). Pada saat yang sama, peningkatan signifikan jumlah pengguna menyebabkan peningkatan penyalahgunaan *internet* dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Fakta bahwa sejak tahun 2008, lebih

dari 144 orang telah dihukum atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama yang berkaitan dengan berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial, merupakan contoh penggunaan *internet* di Indonesia. Selain itu, hingga 31 Desember 2020, Kementerian Kominfo telah memblokir 1.858.554 konten di situs web, sebagian besar di antaranya merupakan situs pornografi. (Kominfo, 2019).

Tindakan pemerintah ini menunjukkan bahwa kemajuan TIK dan *Internet* di Indonesia tidak selalu menguntungkan, literasi digital sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan ASN pada khususnya.

Hal ini merupakan kesiapan ASN memenuhi kewajibannya menjalankan tugas pokok fungsi melalui digital. Kesehariannya tidak terlepas dari kata kata dan tingkah laku digital. Oleh karena itu tanggungjawab ASN adalah berat dan inilah tantangan untuk mewujudkan Indonesia melek digital dan ASN Cakap digital. (Sumiati, 2022).

Kajian teori bijak media sosial adalah cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Beberapa prinsip teoritis yang mendasarinya termasuk: (Mukarom, 2020).

- a. Teori Kesadaran Diri (Self-awareness): Teori ini membahas bagaimana orang menggunakan media sosial dan bagaimana mereka mengevaluasi apa yang mereka *posting* dan bagaimana hal itu berdampak pada mereka. Kesadaran diri membantu orang menghindari tindakan impulsif atau tidak bijak di media sosial.
- b. Teori Privasi dan Batasan (*Privacy and Boundaries*): Teori ini menekankan betapa pentingnya menjaga privasi dan menetapkan batasan yang sehat untuk penggunaan media sosial. Ini termasuk mempertimbangkan jenis informasi pribadi mana yang boleh atau tidak dibagikan secara *online*.
- c. Teori Tanggung Jawab Sosial: Teori ini

mendorong orang untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka di media sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar mereka karena dia menekankan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan lingkungan sosial mereka.

- d. Teori Empati: Ide ini mendorong orang untuk berempati terhadap pendapat dan perasaan orang lain. Ini berarti berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu di media sosial yang dapat merugikan atau menyinggung orang lain.
- e. Teori Pengembangan Pribadi: Teori ini menekankan penggunaan media sosial sebagai alat untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Ini mencakup berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan memotivasi diri sendiri dan orang lain.
- f. Teori Interaksi Sosial: Ini menekankan betapa pentingnya memiliki interaksi positif dan membangun hubungan di media sosial. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermanfaat, mendukung satu sama lain, dan berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) diangkat dan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan kontrak yang bekerja untuk lembaga pemerintah adalah jenis pekerjaan yang dipekerjakan oleh ASN dan dibayar oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai ASN memajukan kebijakan dan pelayanan publik serta mempersatukan bangsa (Prasojo & Rudita, 2014; dan Faedlulloh, 2015). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan profesional (NKRI). (Komara, 2019).

Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja diberbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN memberikan pelayanan publik,

menjalankan tugas pemerintah, dan mendukung pelaksanaan kebijakan. (Achdiat, 2019).

Beberapa fitur ASN di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS): ASN diangkat sebagai PNS setelah melalui proses seleksi yang panjang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga pemerintah yang relevan.
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional: ASN dapat mengisi jabatan struktural, yang merupakan jabatan yang sudah ada dalam organisasi pemerintah, atau jabatan fungsional, yang merupakan jabatan yang lebih khusus yang bergantung pada pendidikan atau keahlian individu.
- c. Sistem Kenaikan Pangkat: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur sistem kenaikan pangkat ASN.

Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan tugas umum adalah tanggung jawab pegawai ASN juga dalam pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; menyediakan layanan publik yang profesional dan berkualitas; dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ASN melakukan ini tanpa bantuan politik dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Indonesia, 2014).

3. *Flexing*.

Dalam bahasa Inggris, "*flexing*" secara harfiah berarti "pamer". Menurut Cambridge Dictionary, *flexi* adalah menunjukkan sesuatu dengan cara yang tidak disukai orang lain. Menurut Kamus Merriam-Webster, "*fleksi*" berarti menunjukkan dengan jelas.

Dalam ilmu ekonomi, perilaku *flexing* didefinisikan sebagai sikap konsumtif yang menonjol yang menghabiskan uang hanya untuk membeli barang mewah dan layanan premium untuk menunjukkan status atau kemampuan finansial mereka. (Arsyad, 2022).

Selain itu, dampak *flexing* bervariasi tergantung pada bagaimana seseorang melakukannya dan bagaimana orang melihatnya. Untuk pelaku sendiri, *flexing* dapat memiliki tujuan positif untuk mengapresiasi diri atas hasil yang mereka capai atau untuk memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa dengan usaha, semua orang dapat mencapai hasil yang baik. Namun, dampak negatif dari *flexing* juga dapat membahayakan diri pelaku sendiri, seperti: (Adinda, 2023).

- a. Hidup orang yang *flexing* akan menjadi semakin konsumtif karena mereka berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan kesan bahwa mereka adalah orang kaya, sehingga mereka sering membeli banyak hal yang mendukung kesan tersebut;
- b. Jika seseorang tidak dapat membuat dirinya terlihat seperti orang kaya, mereka cenderung melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka, seperti nekat berhutang. Jika pelaku tidak dapat membayar hutang mereka atau bahkan melakukan tindakan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian bahkan perampokan hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup mereka, ini akan menjadi masalah besar;
- c. Seseorang yang sangat menyukai *flexing* mungkin tidak lagi mengalami empati. Pelaku *flexing* tidak peduli dengan orang-orang yang miskin dan membutuhkan bantuan karena mereka hanya ingin menunjukkan kekayaan mereka. Jika dilihat secara positif, *flexing* dapat mendorong untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tentunya dengan usaha yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar hukum. Jika dilihat

secara negatif, *flexing* dapat menimbulkan iri dan dengki, dan bahkan dapat mendorong untuk mendapatkan hal yang sama dengan cara yang tidak baik dan melanggar hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi antara penggunaan media sosial dengan gaya hidup *flexingnya* ASN sangat berkaitan erat. Banyak orang, termasuk ASN, menggunakan media sosial untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Mereka dapat berbagi foto atau cerita tentang pengalaman eksklusif, barang mahal, atau perjalanan mewah. Ini memungkinkan penampilan ASN yang glamor dan hedonistik.

Pengaruh pada Orang Lain: Postingan ASN tentang gaya hidup mewah dapat mempengaruhi rekan kerja dan anggota komunitas untuk mengikuti gaya hidup serupa. Jika pendapatan mereka berasal dari dana publik, ini dapat menjadi masalah karena mengganggu tanggung jawab mereka untuk mengelola sumber daya publik dengan benar.

Kontroversi dan Reaksi Publik: Postingan di media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang boros atau tidak sesuai dengan pekerjaan ASN dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menyebabkan kontroversi dan merusak reputasi ASN.

Prinsipnya, setiap karyawan, termasuk ASN, memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya sendiri. Namun, sebagai anggota masyarakat, ASN juga bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya publik dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam situasi ini, penting bagi ASN untuk mempertimbangkan dampak media sosial terhadap citra dan reputasi mereka serta tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur dan bijak dalam menggunakan *platform* media sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak

merugikan organisasi atau masyarakat yang mereka perwakilkan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa ASN menjaga transparansi dalam penggunaan dana publik dan pengeluaran pribadi; selain itu, informasi ini harus tersedia secara publik dan dibawah pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana publik tidak digunakan secara tidak sengaja.

Semua tindakan ASN harus diatur oleh kode etik yang jelas, termasuk cara mereka menggunakan sumber daya publik dan menerima hadiah atau suap. Pelatihan dan pelatihan tentang etika, integritas, dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat harus diberikan kepada ASN agar mereka lebih memahami pentingnya menjalankan tugas dengan integritas.

Mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa ASN melakukan pekerjaannya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan hukum. Untuk mendorong ASN untuk bertindak jujur, masyarakat harus aktif mengawasi pemerintah dan meminta ASN bertanggung jawab. Kepemimpinan pemerintahan yang baik sangat penting. ASN dapat bertindak lebih etis jika pejabat publik menunjukkan contoh yang baik dan mendukung integritas.

Hal penting untuk diingat bahwa tidak semua ASN menjalani gaya hidup hedonisme; banyak dari mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan jujur, tetapi masalah ASN yang menjalani gaya hidup boros dan mewah harus ditangani dengan cermat untuk menjaga akuntabilitas dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

E. PENUTUP

Bersosial media dengan bijak dapat membantu mengedepankan tanggung jawab sosial dan integritas serta meminimalkan gaya hidup hedonisme. Berikut adalah beberapa kesimpulan bijak bermedsos dengan baik:

1. Sadar Diri dan Tujuan Penggunaan: Tentukan alasan Anda menggunakan media sosial. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan penggunaan dapat membantu Anda mengurangi keinginan untuk hidup mewah di *internet*.
2. Pertimbangkan privasi Anda. Jangan membagikan semua aspek kehidupan pribadi Anda di media sosial. Pertimbangkan untuk membatasi informasi pribadi Anda dan berpikir dua kali sebelum membagikan informasi yang terlalu pribadi atau berlebihan.
3. Pentingnya Kesederhanaan: Jangan lupa betapa pentingnya menjaga kesederhanaan dalam gaya hidup Anda. Memamerkan pengalaman mewah atau kekayaan tidak perlu. Sebaliknya, berikan pengalaman yang bermanfaat dan inspiratif kepada orang lain.
4. Konteks dan Tanggung Jawab: Jika Anda seorang ASN atau pejabat pemerintah, Anda harus mempertimbangkan konteks sosial dan tanggung jawab Anda. Postingan Anda tentang penggunaan dana publik harus bijak dan terbuka.
5. Empati dan Penerimaan Terhadap Orang Lain: Jangan membuat orang merasa tidak nyaman atau tidak cukup baik hanya karena postingan Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat, F. M., 2019, Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kabupaten Cianjur Dihubungkan dengan Prinsip Good Governance, *Skripsi*, Program Hukum Tata Negara, Universitas Pasundan, Bandung.
- Adinda, K. 2023. Flexing di Instagram: Antara Narsisme dan Benefit. *Emik*, 6(1), 68–90.
- Arsyad, J. H. 2022. Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.
- Durhan, A. S., 2021, Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Estiningsih, M. 2023. Indonesia Cakap Digital Melalui Kegiatan Literasi Digital Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 695–704.
- Fatoni, A. 2022. *A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi*. Bina Praja Press. Jakarta.
- Febriani, N., & Dewi, W. W. A. 2019. *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Haniza, N. 2019. Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Pola Pikir, Kepribadian dan Kesehatan Mental Manusia. *J. Komun.* 21-31.
- Indonesia, P. R. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Komara, E. 2019. Kompetensi profesional pegawai ASN (aparatur sipil negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84.
- Laksamana, A. 2018. *Public Relations in the Age of Disruption: 17 Pengakuan Professional PR & Kunci Sukses Membangun Karier pada Era Disrupsi*. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mukarom, Z. 2020. *Teori-teori komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

-
- Natika, L., & Septianti, L. P. 2023. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *The World of Public Administration Journal*.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. 2019. *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Jakarta.
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan media sosial: saring sebelum sharing*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sulianta, F. (2020). *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies*. Feri Sulianta.
- Sumiati, I. (2022). *Pengembangan Model Sistem Informasi Administrasi Presensi Dalam Membangun Karakter ASN Berbasis Kinerja*. Tohar Media. Makassar.
- Tan, C.-M. (2018). *Search inside yourself*. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.